

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DESA PEMARON
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2025.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan ketentuan Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

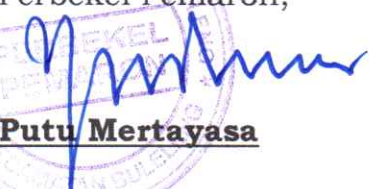
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LPPD akhir tahun ini, salah satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada dimasyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama petunjuk dan bimbingan dari Camat Buleleng dan Bupati Buleleng sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa, dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Pamaron serta semua pihak yang berkepentingan.

Pamaron, 10 Maret 2026
Perbekel Pamaron,


Putu Mertayasa



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2006 Tentang Desa menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menjalankan fungsi Pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Penyelenggaran Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa senantiasa dilandasi prinsip kemitrasejajaran hubungan antara Perbekel dan BPD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan kepada Bupati, BPD dan masyarakat, Pemerintah Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan kepada BPD dan menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditegaskan dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Asas Akuntabel. Hakikat dari Pelaporan ini adalah agar Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu Hukum, Administrasi maupun secara Moral. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa adalah merupakan kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dan Pelaporan ini sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

1. Mengetahui Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan Pemerintahan Desa
2. Mengevaluasi berbagai Aspek, seperti hambatan, permasalahan yang dihadapi, Upaya penanganan solusinya, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya terkait pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

VISI DESA

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Pamaron dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dari Pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat, lembaga masyarakat desa dan masyarakat serta kelompok peduli lainnya. Visi desa adalah:

“TERWUJUDNYA DESA PEMARON YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN FALSAFAH AJEG BALI SANTHI”

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pamaron bersama masyarakat secara partisipatif menuju pada Visi Desa. Penjabaran dan penjelasan visi Desa Pamaron Tahun 2020 – 2027 diatas adalah sebagai berikut :

1. SEJAHTERA, yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan yang baik dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai;



2. MAJU, yang dimaksud dengan maju adalah bergerak ke depan menjadi lebih baik dari sebelumnya;
3. MANDIRI, yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain;
4. BERBUDAYA, yang dimaksud dengan berbudaya adalah suatu keadaan hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh kelompok dan diwariskan kegenerasi berikutnya;
5. FALSAFAH AJEG BALI SANTHI, yang dimaksud dengan falsafah ajeg bali santhi adalah hubungan bali yang kokoh, teratur, tegak, mantap, dan tidak berubah untuk mencapai kedamaian.

MISI DESA

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Pamaran, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pamaran adalah :

“ Dengan Simbol “ NAWA CITTA ” / Sembilan langkah strategi mewujudkan Visi yang akan dituangkan 2020 – 2027 di RPJM Des .

1. Mengoptimalkan pelayanan yang prima ke Pada Masyarakat di dalam pengurusan surat – menyurat, Administrasi ke Pendudukan dengan cepat Profesional tanpa pambrih (gratis)
2. Menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan Desa dan rumah tangga untuk mewujudkan kenyamanan, Keindahan serta menata potensi – potensi yang menunjang Pariwisata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang siap bersaing baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dengan memberikan pelatihan – pelatihan Generasi Muda. Serta menyediakan sarana prasarana olah Raga, TK / Paud dan kesenian Adat Budaya Bali
4. Memotivasi dan memberikan Rangsangan kepada Masyarakat untuk membuka atau menambah Usaha- usaha kecil dan menengah.
5. Meningkatkan dan Menjaga kesehatan masyarakat dengan Pos Yandu Balita dan Lansia setiap bulan, Periksa Ibu hamil, optimalkan kader Jumatik serta melaksanakan Fogging Massal, Mempalitasi Pengurusan Kartu Kis, Kip serta Pemberian sembako kepada lansia dan Masyarakat kurang mampu.



6. Bersenergi dengan Desa adat untuk memajukan kesenian Adat Budaya supaya tetap Ajeg dan Lestari.
7. Menggali potensi Desa untuk di kembangkan menjadi usaha- usaha Desa yang akan di kelola oleh BUMDES yang nantinya dapat meningkatkan PAD Desa dan untuk mensejahterakan Masyarakat.
8. Menciptakan Pemerintahan Desa yang bersih, Jujur, Transparan , Akuntabel dan kreatif , Inovatif teknologi modern.

Menata beografi , profil dan informasi desa untuk mewujudkan “MOTTO DESA PEMARON NYAMAN ‘BERSIH, AMAN, LESTARI, INDAH, SEHAT, SEJAHTRA , NYAMAN, MAJU DAN MANDIRI”

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh Tim Perumus bersama Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, serta Masyarakat Desa Pamaron pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapat dari hasil pengkajian Desa dimulai dari menjangkau Aspirasi Masyarakat mulai dari tingkat Masyarakat terendah seperti Buruh, Petani, Nelayan sampai pada tingkat paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng serta Penjabaran Visi Misi Desa.

Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkanlah masalah utama atau isu strategis dalam Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Desa Pamaron adalah sebagai berikut :

1. Belum memadainya Sarana Prasarana Desa seperti Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, dan Komunikasi.
2. Keberadaan Kelompok-kelompok yang ada belum ditata dengan baik dan belum menyadari arti dan makna berkelompok.
3. Masih rendahnya Kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa
4. Kurangnya Fasilitas Akses Informasi Desa berbasis Teknologi
5. Terbatasnya Pembinaan Generasi Muda Desa
6. Masih sangat rendahnya tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Desa
7. Kesejahteraan Masyarakat Desa masih rendah
8. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa



BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANANNYA

A. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
2. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
3. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD
4. Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
6. Kegiatan Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali
7. Kegiatan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali
8. Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
10. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
11. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
12. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
13. Kegiatan Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
14. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
15. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
16. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDesa Perubahan, LPJ)
17. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
18. Kegiatan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
19. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan, Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD



Pelaksanaan dari Rencana Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
2. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
3. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD
4. Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
6. Kegiatan Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali
7. Kegiatan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali
8. Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
10. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
11. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
12. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
13. Kegiatan Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
14. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
15. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
16. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDesa Perubahan, LPJ)
17. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
18. Kegiatan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
19. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan, Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD

B. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
2. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD
3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Praga PAUD/TK
4. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar



5. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
6. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
7. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
8. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
9. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa
10. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
11. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong, selokan, drainase, dll)
12. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong, selokan, drainase, dll)
13. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
14. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Monumen/ Gapura Batas Desa
15. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
16. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Milik Desa
17. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
18. Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Pelaksanaan dari Rencana Program Pembangunan dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
2. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD
3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Praga PAUD/TK
4. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
5. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
6. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
7. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
8. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
9. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa
10. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang



-
11. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong, selokan, drainase, dll)
 12. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong, selokan, drainase, dll)
 13. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 14. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Monumen/ Gapura Batas Desa
 15. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
 16. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Milik Desa
 17. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 18. Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

C. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
4. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
5. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
6. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
7. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
8. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
9. Kegiatan Pembinaan PKK



Pelaksanaan dari Rencana Program Pembinaan Kemasyarakatan dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan
4. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
5. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
6. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
7. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
8. Kegiatan Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
9. Kegiatan Pembinaan PKK

D. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)
2. Kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
5. Kegiatan pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa

Pelaksanaan dari Rencana Program Pembinaan Kemasyarakatan dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)



-
2. Kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)
 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 5. Kegiatan pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

E. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK.

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Keadaan Mendesak, berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa

Pelaksanaan dari Rencana Program Pembinaan Kemasyarakatan dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa



BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Pemaron Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Peraturan Desa Pemaron Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian terlampir pada Format C.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

❖ PENDAPATAN

PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp.	30.500.000,00
	- Hasil Usaha Desa	Rp.	5.000.000,00
	- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	0,00
	- Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp.	25.500.000,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp.	2.836.494.652,00
	- Dana Desa	Rp.	981.820.000,00
	- Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	436.092.290,00
	- Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	39.454.105,00



	- Alokasi Dana Desa	Rp.	575.977.757,00
	- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	67.800.000,00
	- Bantuan Kabupaten/ Kota	Rp.	735.350.500,00
3	PENDAPATAN LAIN - LAIN	Rp.	55.000.000,00
	- Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp.	50.500.000,00
	- Bunga Bank	Rp.	4.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	2.921.994.652,00

❖ BELANJA

			BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.134.578.236,12
1	1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 782.673.236,12
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 77.400.000,00
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 385.020.000,00
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 0,00
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Rp. 123.254.100,00
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 51.500.000,00
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian	Rp. 5.000.000,00



			Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT	Rp. 17.600.000,00
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp. 29.454.000,00
1	1	91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	Rp. 18.000.000,00
1	1	92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	Rp. 34.800.000,00
1	2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 170.330.000,00
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Rp. 170.330.000,00
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp. 0,00
1	3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 42.100.000,00
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Rp. 0,00
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Rp. 14.500.000,00
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Rp. 27.600.000,00
1	4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 70.825.000,00
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Rp. 2.875.000,00
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Rp. 0,00
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Rp. 1.825.000,00



1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Rp. 26.900.000,00
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Rp. 1.050.000,00
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Rp. 1.050.000,00
1	4	10	Dukukngan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	Rp. 9.600.000,00
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba	Rp. 27.525.000,00
1	5		Pertanahan	Rp. 68.650.000,00
1	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Rp. 40.000.000,00
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 28.650.000,00
2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 1.458.918.000,00
2	1		Pendidikan	Rp. 108.250.000,00
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Rp. 91.250.000,00
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Rp. 0,00
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Rp. 17.000.000,00
2	2		Kesehatan	Rp. 100.360.00,00
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp. 74.835.000,00



2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan)	Rp.	3.750.000,00
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp.	11.175.000,00
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp.	10.600.000,00
2	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	976.194.000,00
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp.	341.355.000,00
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Rp.	168.399.000,00
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)	Rp.	0,00
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp.	448.945.000,00
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Rp.	1.400.000,00
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan	Rp.	16.094.400,00
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Rp.	0,00
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa	Rp.	0,00
2	4		Kawasan Permukiman	Rp.	204.514.000,00
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Rp.	170.925.000,00
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Rp.	33.589.000,00
2	5		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp.	24.200.000,00
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Rp.	24.200.000,00
2	6		Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.	45.400.000,00
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Rp.	45.400.000,00



3			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Rp. 234.596.224,11
3	1		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Rp. 43.220.500,00
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Rp. 43.220.500,00
3	2		Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 101.150.724,11
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Rp. 5.800.000,00
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt.Kec/Kab/Kot)	Rp. 14.000.000,00
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Rp. 81.350.724,11
3	3		Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 30.000.000,00
3	3	01	Pengiriman kontingen kepemudaan & Olahraga sebagai wakil desa tkt kec/kab/kota	Rp. 30.000.000,00
3	3	04	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Rp. 0,00
3	4		Kelembagaan Masyarakat	Rp. 60.225.000,00
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 15.000.000,00
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 7.975.000,00
3	4	03	Pembinaan PKK	Rp. 37.250.000,00
4			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 16.650.000,00
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 0,00
4	1	05	Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dll)	Rp. 0,00
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	Rp. 5.000.000,00
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)	Rp. 0,00



4	3		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp.	11.650.000,00
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Rp.	2.600.000,00
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Rp.	9.050.000,00
5			PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	Rp.	109.174.525,99
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	1.174.525,99
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Rp.	1.174.525,99
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp.	108.000.000,00
5	3	00	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp.	108.000.000,00
JUMLAH BELANJA				Rp.	2.953.916.986,22

❖ PEMBIAYAAN

3	PEMBIAYAAN DESA	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 236.922.334,22
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 205.000.000,00
	Pembiaya Netto	Rp. 31.922.334,22

❖ SISA LEBIH / (KURANG)

4	SILPA Akhir Tahun 2025	Rp. 286.571.905,67
---	-------------------------------	---------------------------



BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Pengelolaan dan Penatausahaan Adminsitasi Desa - Sarana dan Prasarana Kantor semakin memadai	- Untuk sementara tidak ada permasalahan - Belum terlaksananya Pendataan Data Dasar Keluarga	- Tetap mempertahankan dan berusaha meningkatkan kemampuan. - Diperlukan Ketua-Ketua Kelompok yang ada di Desa untuk melakukan Pendataan
2	Pembangunan Desa	- Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan / Betonisasi di Gang-gang menuju Perumahan Penduduk	- Tidak ada permasalahan, semua kegiatan berjalan sesuai harapan.	- Pembangunan Fisik tetap bisa dilaksanakan dengan keterlibatan Masyarakat yaitu dengan swadaya Masyarakat
3	Pembinaan Kemasyarakatan	- Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Linmas sudah mulai memadai	- Pemanfaatan Sarana Pos Keamanan yang belum maksimal	- Mengupayakan adanya Poskamling di masing-masing Banjar untuk tetap menjaga keamanan Desa



		- Terlaksananya Festival kesenian, Adat/kebudayaan dan Keagamaan - Terlaksananya Pembinaan Kesenian Gong Bleganjur Remaja - Semakin meningkatnya prestasi Olah Raga bidang Futsal dan sepak bola	- Berjalan lancar dan tidak ada permasalahan - Kurangnya Sarana dan Prasarana yang lebih mendukung - Kurangnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	- Mengupayakan bantuan perangkat gambelan Gong Gede - Menginventarisir Data Sekeha Gong - Meningkatkan dan mengajak anak remaja untuk mengikuti pembinaan
4	Pemberdayaan Masyarakat	- Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kelompok Kesenian Tradisional - Terlaksananya Pelatihan Yoga Ibu-ibu PKK - Terlaksananya kegiatan Kelompok Pemuda,	- Semua berjalan lancar sesuai dengan harapan - Permasalahan yang kami hadapi dikarenakan sumber dana yang kami pergunakan untuk kegiatan ini tidak terealisasi dari Pemerintah.	- Kedepan akan berusaha lebih meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat.



BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN LAPORAN

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah bagian terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa, maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam Laporan ini sebagai berikut :

1. Perbekel menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025.
2. Tahapan Perencanaan Program dan Kegiatan disesuaikan dengan RKP Desa Pemaron.
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program Kegiatan Desa Pemaron Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
4. Terurainya Tingkat pencapaian keberhasilan, Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya
5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pemaron yang meliputi penyelenggaran urusan dan kewenangan yang telah ada dan dilaksanakan secara rutin dari tahun ke tahun, telah terlaksana dengan baik hal ini terjadi melalui kerja sama dan hubungan yang harmonis antara Pemerintah desa dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta serta seluruh komponen masyarakat dalam kerangka Good Governace untuk mewujudkan Desa Pemaron yang Prima dalam Pelayanan menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan TRI HITA KARANA.

B. SARAN

1. Seiring dengan harapan dalam hal ini Menteri Desa dan Menteri Keuangan yang menginginkan Desa Cermat dan Cepat dalam Penyerapan Anggaran maka dengan ini kami tanpa mengurangi rasa hormat memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten tidak lambat dalam Penetapan Pagu Anggaran



sehingga Desa dapat dengan cepat menyelesaikan Perencanaan Kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Demi Kelancaran Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kami dari Pemerintah Desa sangat antusias sekali jika Pemerintah Kabupaten atau Dinas terkait selalu berupaya meningkatkan Kapasitas Aparat Desa khususnya tentang Pengelola Keuangan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024 kami buat sebagai bahan evaluasi Kinerja kami Pemerintah Desa Pamaron dan sebagai Laporan.

Pamaron, 10 Maret 2026

Perbekel Pamaron,


PUTU MERTAYASA



LAMPIRAN I

A. Kependudukan

1. JUMLAH

Jumlah laki-laki	2809 orang
Jumlah perempuan	2739 orang
Jumlah total -	5548 orang
Jumlah kepala keluarga	1761KK
Kepadatan Penduduk	per km

2. USIA

USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
0-12 bulan	13	Org	23	Org	39 tahun	42	Org	34	Org
1 tahun	31	Org	33	Org	40 tahun	40	Org	45	Org
2 tahun	44	Org	43	Org	41 tahun	41	Org	31	Org
3 tahun	36	Org	31	Org	42 tahun	34	Org	39	Org
4 tahun	32	Org	31	Org	43 tahun	29	Org	35	Org
5 tahun	53	Org	41	Org	44 tahun	29	Org	45	Org
6 tahun	59	Org	42	Org	45 tahun	35	Org	34	Org
7 tahun	44	Org	38	Org	46 tahun	33	Org	38	Org
8 tahun	45	Org	47	Org	47 tahun	36	Org	30	Org
9 tahun	47	Org	65	Org	48 tahun	41	Org	33	Org
10 tahun	53	Org	49	Org	49 tahun	26	Org	34	Org
11 tahun	56	Org	48	Org	50 tahun	38	Org	47	Org
12 tahun	44	Org	48	Org	51 tahun	34	Org	34	Org
13 tahun	48	Org	42	Org	52 tahun	38	Org	53	Org
14 tahun	45	Org	39	Org	53 tahun	43	Org	39	Org
15 tahun	48	Org	48	Org	54 tahun	32	Org	41	Org
16 tahun	48	Org	39	Org	55 tahun	30	Org	32	Org
17 tahun	49	Org	41	Org	56 tahun	51	Org	38	Org
18 tahun	45	Org	49	Org	57 tahun	23	Org	24	Org
19 tahun	55	Org	39	Org	58 tahun	17	Org	32	Org
20 tahun	46	Org	42	Org	59 tahun	40	Org	38	Org
21 tahun	52	Org	45	Org	60 tahun	21	Org	22	Org
22 tahun	53	Org	37	Org	61 tahun	62	Org	33	Org
23 tahun	50	Org	49	Org	62 tahun	26	Org	26	Org
24 tahun	52	Org	50	Org	63 tahun	25	Org	22	Org
25 tahun	50	Org	57	Org	64 tahun	23	Org	22	Org
26 tahun	46	Org	45	Org	65 tahun	25	Org	39	Org
27 tahun	49	Org	52	Org	66 tahun	21	Org	21	Org
28 tahun	39	Org	44	Org	67 tahun	14	Org	19	Org



29 tahun	35	Org	47	Org	68 tahun	14	Org	17	Org
30 tahun	40	Org	45	Org	69 tahun	15	Org	18	Org
31 tahun	47	Org	45	Org	70 tahun	10	Org	16	Org
32 tahun	46	Org	42	Org	71 tahun	13	Org	12	Org
33 tahun	48	Org	46	Org	72 tahun	14	Org	17	Org
34 tahun	45	Org	38	Org	73 tahun	18	Org	16	Org
35 tahun	29	Org	36	Org	74 tahun	8	Org	16	Org
36 tahun	41	Org	51	Org	75 tahun	6	Org	18	Org
37 tahun	42	Org	46	Org	> 75 tahun	47	Org	50	Org
38 tahun	43	Org	38	Org	Total	2780 Org		2739Org	

3. Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	35 orang	320 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	198 orang	156 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	10 orang	15 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	407 orang	174 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	156 orang	78 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	128 orang	123 orang
Tamat SD/ sederajat	344 orang	542 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP	29 orang	6 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	20 orang	5 orang
Tamat SMP/ sederajat	264 orang	280 orang
Tamat SMA/ sederajat	754 orang	652 orang
Tamat D-1/ sederajat	60 orang	26 orang
Tamat D-2/ sederajat	46 orang	24 orang
Tamat D-3/ sederajat	68 orang	78 orang
Tamat S-1/ sederajat	247 orang	257 orang
Tamat S-2/ sederajat	31 orang	16 orang
Tamat S-3/ sederajat	2 orang	1 orang
Tamat SLB A	orang	orang
Tamat SLB B	orang	orang
Tamat SLB C	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang
Jumlah Total	5548 orang	

B. MATA PENCAHARIAN POKOK

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	30 orang	12 orang
Buruh tani	5 orang	1 orang
Buruh migran perempuan	orang	orang
Buruh migran laki-laki	orang	orang



Pegawai Negeri Sipil	139 orang	125 orang
Pengrajin industri rumah tangga	orang	orang
Pedagang keliling	orang	orang
Peternak	orang	orang
Nelayan	22 orang	1 orang
Montir	3 orang	0 orang
Dokter swasta	1 orang	2 orang
Bidan swasta	orang	1 orang
Perawat swasta	orang	orang
Pembantu rumah tangga	orang	1 orang
TNI	10 orang	orang
POLRI	44 orang	1 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	55 orang	10 orang
Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	7 orang
Pengacara	1 orang	orang
Notaris	37 orang	1 orang
Dukun Kampung Terlatih	orang	orang
Jasa pengobatan alternatif	orang	orang
Dosen swasta	4 orang	orang
Pengusaha besar	orang	orang
Arsitektur	orang	orang
Seniman/Artis	1 orang	orang
Karyawan perusahaan swasta	469 orang	296 norang
Karyawan perusahaan pemerintah	23 orang	20 orang
Wiraswasta	302 orang	141 orang
Wartawan	orang	orang
Transportasi	8 orang	orang
Pedagang	23 orang	124 orang
Perawat	orang	4 orang
Pelajar/Mahasiswa	440 orang	360 orang
DII	1194 orang	1636 orang
	orang	orang
jumlah	2809 orang	2739orang
Jumlah Total Penduduk 5548 orang		

C. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	302 orang	304 orang
Kristen	94 orang	109 orang
Katholik	61 orang	45 orang
Hindu	2249 orang	2229orang
Budha	80 orang	67 orang
Khonghucu	orang	orang
Kepercayaan Kepada	orang	orang



Tuhan YME		
Aliran Kepercayaan lainnya	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang

D. KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	2799 orang	2739 orang
Warga Negara Asing	2 orang	orang
Dwi Kewarganegaraan	orang	orang
Jumlah	2809 orang	2739 orang

E. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan	Ada/ Tidak	Perda/Keputusan Bupati/Camat/Belum Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada/ tidak	Perda/Keputusan Bupati/Camat/Be lum Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	10 orang	
Jumlah perangkat desa/kelurahan	10 unit kerja	
Kepala Desa/Lurah	Ada/ tidak	
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada/ tidak	
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Pembangunan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Umum	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Kepala Urusan Keuangan	Ada/ tidak – Aktif/ tidak	
Jumlah Staf	4 orang	
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	2 dusun/lingkungan Aktif/ tidak	
Kepala Dusun/Banjar Dinas Daging Margi	Aktif/ tidak	
Kepala Dusun/ Banjar Dinas Dauh Margi	Aktif/ tidak	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SMA, S1	
Kepala Desa/Lurah	SMA	
Sekretaris Desa/Kelurahan	SMA	
Kepala Urusan Pemerintahan	SMA	
Kepala Urusan Perencanaan	SMA	
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	S1	



Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	S1
Kepala Urusan Umum	S1
Kepala Urusan Keuangan	SMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada/tidak
Jumlah Anggota BPD	5 orang
Pendidikan Anggota BPD	SMA, S1
Ketua : Drs Gede Artana	S1
Wakil Ketua : Gede Made Susila Budi D	SMA
Sekretaris : Putu Sri Puji	S1
Anggota, Nama : Ketut Putra	SMA
Anggota, Nama : Putu Suardika	SMA

F. Pertanahan

1. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Pantai	
Sebelah selatan	Desa Panji Anom	Sukasada
Sebelah timur	Desa Baktiseraga	Buleleng
Sebelah barat	Desa Tukadmungga	Buleleng

2. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada/belum ada	Perdes No -	Ada/tidak

3. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas pemukiman	71.00 ha/m2
Luas persawahan	15.00..ha/m2
Luas perkebunan	7.00..ha/m2
Luas kuburan	0.10 .ha/m2
Luas pekarangan	40.00 ha/m2
Luas taman	0ha/m2
Perkantoran	8.00 ha/m2
Luas prasarana umum lainnya	5,00..ha/m2
Total luas	146.00 ha/m2

TANAH SAWAH

Sawah irigasi teknis	15.85 .ha/m2
Sawah irigasi ½ teknis	0 ha/m2
Sawah tadah hujan	0 ha/m2
Sawah pasang surut	ha/m2
Total luas	15.85 .ha/m2



TANAH KERING	
Tegal/ladang	0 ha/m2
Pemukiman	0 ha/m2
Pekarangan	0 ha/m2
Total luas	0 ha/m2
TANAH BASAH	
Tanah rawa	0 ha/m2
Pasang surut	0 ha/m2
Lahan gambut	0 ha/m2
Situ/waduk/danau	0 ha/m2
Total luas	
TANAH PERKEBUNAN	
Tanah perkebunan rakyat	0 ha/m2
Tanah perkebunan negara	0 ha/m2
Tanah perkebunan swasta	0 ha/m2
Tanah perkebunan perorangan	7.00...ha/m2
Total luas	7.00 ha/m2
TANAH FASILITAS UMUM	
Kas Desa/Kelurahan:	0 ha/m2
a. Tanah bengkok	0 ha/m2
b. Tanah titi sara	0 ha/m2
c. Kebun desa	0 ha/m2
d. Sawah desa	0 ha/m2
Lapangan olahraga	0 ha/m2
Perkantoran pemerintah	0 ha/m2
Ruang publik/taman kota	0 ha/m2
Tempat pemakaman desa/umum	0 ha/m2
Tempat pembuangan sampah	0 ha/m2
Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	0 ha/m2
Pertokoan	0 ha/m2
Fasilitas pasar	0 ha/m2
Terminal	0 ha/m2
Jalan	0 ha/m2
Daerah tangkapan air	0 ha/m2
Usaha perikanan	0 ha/m2
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	0 ha/m2
Total luas	0 ha/m2
HUTAN	
Hutan lindung	0 ha/m2
Hutan produksi	0 ha/m2
a. Hutan produksi tetap	0 ha/m2
b. Hutan terbatas	0 ha/m2



Hutan konservasi	0 ha/m2
Hutan adat	0 ha/m2
Hutan asli	0 ha/m2
Hutan sekunder	0 ha/m2
Hutan buatan	0 ha/m2
Hutan mangrove	0 ha/m2
Hutan suaka	0 ha/m2
a. Suaka alam	0 ha/m2
b. Suaka margasatwa	0 ha/m2
Hutan rakyat	0 ha/m2
Total luas	0 ha/m2

4. Iklim

Curah hujan	1321-2929...Mm
Jumlah bulan hujan	5 . bulan
Kelembapan	79% -87 %
Suhu rata-rata harian	26.9 -31.6.°C
Tinggi tempat dari permukaan laut	2-10.mdl

5. Jenis dan kesuburan tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Merah/Hitam/ Kuning/ Abu-abu
Tekstur tanah	Lampungan/ Pasiran/Debu an
Tingkat kemiringan tanah	0,3 ..derajat
Lahan kritis	0 ha/m2
Lahan terlantar	0 ha/m2
Tingkat erosi tanah	
Luas tanah erosi ringan	0 ha/m2
Luas tanah erosi sedang	0 ha/m2
Luas tanah erosi berat	0 ha/m2
Luas tanah yang tidak ada erosi	0 ha/m2

G. TOPOGRAFI

1. Bentangan wilayah

Desa/kelurahan dataran rendah	Ya/ tidak	100 ha/m2
Desa/kelurahan berbukit-bukit	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan lereng gunung	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	Ya/ tidak	46 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan rawa	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan gambut	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan aliran sungai	Ya /tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan bantaran sungai	Ya /tidak	0 ha/m2



2. Letak

Desa/kelurahan kawasan perkantoran	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan campuran	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan kawasan industri	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan kepulauan	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan pantai/pesisir	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan kawasan hutan	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan taman suaka	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan kawasan wisata	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	-Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan rawan banjir	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan bebas banjir	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan potensial tsunami	Ya/tidak	0 ha/m2
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi	Ya/tidak	0 ha/m2

Orbitasi		
Jarak ke ibu kota kecamatan	5 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0.10 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	0.30 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	 unit	Ada/tidak
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	5 ... Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	0.10 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	0.30 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	 unit	Ada/tidak
Jarak ke ibu kota provinsi	115 . Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	2.5 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	2.4 . Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	 unit	Ada/tidak



H. LEMBAGA KEAMANAN

1. Hansip dan Linmas	
Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada/ tidak
Jumlah anggota Hansip	- orang
Jumlah anggota Satgas Linmas	32 orang
Pelaksanaan SISKAMLING	Ada/ tidak
Jumlah Pos Kamling	10 buah

2. Satpam Swakarsa	
Keberadaan SATPAM SWAKARSA	Ada/Tidak
Jumlah anggota	orang
Nama organisasi induk	
Pemilik organisasi	Pemerintah/Swasta / Organisasi
Keberadaan organisasi keamanan lainnya	Ada/tidak

3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI – POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS	
Mitra Koramil / TNI	Ada/ tidak
Jumlah anggota	1 Orang
Jumlah kegiatan	jenis kegiatan
Babinkamtibmas / POLRI	Ada/ tidak
Jumlah anggota	1 Orang
Jumlah kegiatan	jenis kegiatan

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	1kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	50%
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	75%
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	50%
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	100%
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif	Ya/ tidak
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan	Ya/ tidak



Kelurahan	
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya/ tidak
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100%
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	90%
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	...-%
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	- kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada/ tidak
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada/ tidak
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada/ tidak
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah kabupaten/Kota dan provinsi	16 kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	...- .kegiatan

2. Peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	6%
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	50%
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	5 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	...-.kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	-....%



Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100%
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	100%
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	-....%
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada/ tidak
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada/ tidak
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	- Kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	- Kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	- Kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	5 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	5 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	2 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	- kegiatan

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

Jumlah kelompok arisan	4 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	...orang
Ada tidaknya dana sehat	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	Ada/ tidak



sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada/ tidak
Ada tidaknya kerjasama antar Desa/Kelurahan	Ada/ tidak
Ada tidaknya penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam penyelesaian konflik di setiap desa/kelurahan oleh masyarakat sendiri	Ada/ tidak
Ada tidaknya gotong royong dalam menolong keluarga tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan	Ada/ tidak
Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa	Ada/ tidak
Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana	Ada/ tidak
Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong	Ada/ tidak

Pemaron, 10 Maret 2026

Perbekel Pemaron,

PUTU MERTAYASA